

## REVITALISASI PERKEBUNAN KARET RAKYAT MELALUI PENDEKATAN KAWASAN INDUSTRI MASYARAKAT PERKEBUNAN (KIMBUN)

Oleh:  
Syurya Hidayat<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

### ABSTRACT

*To achieve prosperity in regional development and revitalization society rubber plantation in Jambi Province, it needs development policy reorientation. The approach is directed by regional development by plantation society industrial program.*

*To support the implementation program to be mutual benefit, Cooperative Commodity Development Center (CCDC) needs to establish also. It will be a forum to coordinate and communicate the regional development elements.*

**Keywords:** *revitalization, regional development, CCDC*

### PENDAHULUAN

Diperlukan reorientasi dan pergeseran paradigma dalam kebijakan pembangunan perkebunan karet rakyat secara menyeluruh pada berbagai tingkatan. Hal ini bertujuan untuk peningkatan daya saing komoditas perkebunan dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri, peningkatan devisa, pengembangan wilayah dan sebagai instrumen pemerataan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, program revitalisasi perkebunan karet rakyat di Provinsi Jambi dapat mencapai sukses.

Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pengembangan perkebunan melalui pendekatan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan yang dimaksud merupakan usaha pembangunan perkebunan yang menggunakan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan dimensi ruang, waktu, skala usaha dan pengelolaannya yang diselenggarakan dengan asas kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat/ petani perkebunan dan pelaku usaha lainnya yang selaras berkeadilan, menjamin pemantapan usaha yang harmonis berkesinambungan.

Atas dasar kerangka pikir tersebut maka perlu dilakukan suatu penelitian secara lebih komprehensif guna menemukan fakta-fakta yang lebih realistis. Pada akhirnya akan terumuskan suatu strategi kebijakan yang lebih operasional

dalam mensukseskan program revitalisasi perkebunan karet rakyat di Provinsi Jambi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi kebijakan yang lebih operasional dalam melaksanakan program revitalisasi perkebunan karet rakyat melalui pendekatan kawasan industri masyarakat perkebunan di Provinsi Jambi. Hal ini berguna sebagai dasar kebijakan bagi pemerintah Provinsi Jambi dan instansi terkait dalam pencapaian tujuan Program Revitalisasi Perkebunan Karet Rakyat di Provinsi Jambi.

### METODE ANALISIS

#### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tiga metode. Ketiga metode tersebut digunakan secara simultan dan saling melengkapi. Adapun metode dimaksud adalah Metode Observasi, Metode Deskriptif Kuantitatif dan Metode Kajian Bersama.

Metode Observasi yang digunakan adalah metode pengamatan lapangan secara langsung terhadap objek yang dibahas dan dirancang untuk ditumbuh kembangkan. Pengamatan lapangan ini dilakukan secara objektif. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dilakukan pula prediksi terhadap perubahan yang mungkin terjadi dimasa datang yang dituangkan dalam rancang bangun.

Metode Deskriptif Kuantitatif yang digunakan adalah suatu metode dalam membahas status objek yang diamati pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, yang berdasarkan analisis kuantitatif yang dibuat.

Metode Kajian Bersama digunakan untuk mendiskusikan potensi dan permasalahan yang terkait dengan objek penelitian. Di samping itu, melalui metode tersebut didiskusikan strategi dan pola pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan di Provinsi Jambi. Dalam Metode Kajian Bersama ini dilakukan pembahasan secara bersama terhadap segala aspek. Sehingga dapat menghasilkan rumusan kebijakan berdasarkan kesepakatan bersama antara peneliti dengan setiap individu yang terlibat dalam perancangan dan pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan.

## 2. Tinjauan Konseptual

### a. Konsepsi Revitalisasi Perkebunan

Revitalisasi perkebunan mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor perkebunan secara proporsional dan kontekstual. Dalam artian menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja sektor perkebunan dalam pembangunan dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Revitalisasi bukan dimaksudkan membangun perkebunan *at all cost* dengan cara-cara yang *top-down* sentralistik, bukan pula orientasi proyek untuk menggalang dana. Revitalisasi adalah menggalang komitmen dan kerja sama seluruh *stakeholder* dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat dalam melihat sektor perkebunan tidak hanya sekedar menghasilkan komoditas (Eugenio dan Lucio,2000). Perkebunan mempunyai fungsi ganda yang belum mendapat apresiasi yang memadai dari masyarakat. Perkebunan merupakan *way of life* dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat kita.

Permasalahan utama dalam revitalisasi perkebunan yang dihadapi adalah (1) kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi, (2) keberadaan kelembagaan petani dan penyuluhan makin lemah, (3) lahan pengusahaan makin sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi keperluan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi, (4) akses petani ke sumber daya produktif masih sangat terbatas, (5) sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perkebunan yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk perkebunan masih rendah.

Tujuan dari revitalisasi perkebunan adalah terwujudnya sektor perkebunan yang berdaya saing, memantapkan kemandirian, tercapainya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat, terhapusnya kemiskinan di sektor perkebunan. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita petani.

### b. Konsepsi Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan

Konsepsi kawasan industri masyarakat perkebunan sebagai pendekatan pembangunan agribisnis perkebunan dapat dilihat dari 3 dimensi yaitu:

#### 1). Dimensi Ruang

Kawasan industri masyarakat perkebunan sebagai suatu kawasan / wilayah yang terukur dari segi fisik, ekonomi dan sosial merupakan tempat berlangsungnya sistem dan usaha agribisnis berbasis perkebunan yang didukung oleh komponen fisik berupa :

- a). Areal budidaya perkebunan dan potensi untuk pengembangannya.
- b). Masyarakat setempat dan pelaku usaha perkebunan yang sebagian besar atau seluruhnya memperoleh pendapatan utama dari usaha perkebunan.
- c). Sarana dan prasarana pendukung.
- d). Adanya hubungan kegiatan antar komponen.

#### 2). Dimensi Waktu

Kawasan industri masyarakat perkebunan sebagai suatu proses kegiatan sub sistem yang saling bersinergi dari sistem dan usaha agribisnis di suatu wilayah, yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan pelaku usaha perkebunan untuk mencapai kondisi yang diharapkan melalui tahapan pengembangan yang direncanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

#### 3). Dimensi Manajemen

Kawasan industri masyarakat perkebunan sebagai suatu tatanan penyelenggaraan sistem dan usaha agribisnis berbasis perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan pelaku usaha perkebunan dalam kawasan tertentu dengan menerapkan prinsip manajemen dan kebersamaan ekonomi untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selaras, berkeadilan dan berkesinambungan.

Secara normatif, pelaksanaan kawasan industri masyarakat perkebunan dilakukan oleh masyarakat setempat dan atau bersama-sama dengan perusahaan perkebunan berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan berkeadilan sebagai perekat keutuhan pelaksanaan sistem dan usaha agribisnis, dimana pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, mediasi, dinamisasi dan regulasi (Bertrand dan Mark,2000). Adapun prinsip penyelenggaraan kawasan industri masyarakat perkebunan mengacu kepada hal sebagai berikut :

- a. Tersedianya informasi, baik teknis maupun pasar didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijadikan basis dalam menentukan arah dan strategi pengembangan pada masing-masing kawasan industri masyarakat perkebunan.
- b. Adanya kerjasama dan jejaring untuk menciptakan sinergi usaha, peningkatan produktivitas dan efisiensi.
- c. Perlunya pengembangan sumber daya manusia baik petani pekebun maupun pelaku usaha lainnya untuk penumbuhan kreativitas, inovasi, adaptasi untuk menciptakan nilai tambah bagi menjamin berkembangnya sistem dan usaha agribisnis.
- d. Keberlanjutan usaha, baik dari sisi sosial budaya, ekonomi maupun ekologi .
- e. Optimalisasi produktivitas dan efisiensi usaha.
- f. Adanya kelembagaan usaha yang mandiri.
- g. Pemanfaatan potensi sumber daya yang ada.
- h. Adanya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan.

Standar minimal untuk membangun kawasan industri masyarakat perkebunan memerlukan adanya kawasan budidaya, petani pekebun dan adanya kemitraan antara pelaku usaha. Standar penilaian keberhasilan penyelenggaraan kawasan industri masyarakat perkebunan didasarkan pada kondisi usaha perkebunan yang dicapai dalam setiap tahap pengembangannya.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Strategi Pengembangan Komprehensif

Pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan secara komprehensif memerlukan dukungan 6 sub strategi. Keenam sub strategi tersebut adalah mengembangkan pusat pembibitan unggul, optimalisasi meningkatkan pendapatan pekebun, membangun sarana dan prasarana kawasan, meningkatkan mutu sumberdaya manusia pekebun, mengembangkan kelembagaan usaha dan mengembangkan jejaring usaha.

Melalui keenam sub strategi pengembangan komprehensif maka pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan dapat diintegrasikan dan disinkronkan antar kawasan industri masyarakat perkebunan. Dengan demikian, dapat dibangun fasilitas bersama bagi kawasan industri masyarakat perkebunan seperti pusat pembibitan unggul, pusat pelatihan pekebun dan pusat pelatihan manajemen kelompok tani dan koperasi.

Membangun sarana dan prasarana pada kawasan industri masyarakat perkebunan dan antar

kawasan industri masyarakat perkebunan perlu dilakukan agar mempercepat pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan di Provinsi Jambi. Membangun jalan antar kebun dalam kawasan industri masyarakat perkebunan dan jalan antar kawasan industri masyarakat perkebunan perlu dilakukan (Edward,2001). Disamping itu, penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi juga amat penting bagi pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan secara komprehensif. Penggunaan telepon seluler di kawasan kawasan industri masyarakat perkebunan Agrowiyana sekitarnya merupakan contoh baik untuk dikembangkan karena mempercepat arus informasi bagi pelaku bisnis pada kawasan industri masyarakat perkebunan.

### 2. Strategi Pengembangan Agroindustri Pada Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan

Pengembangan agroindustri pada kawasan industri masyarakat perkebunan merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, semua faktor yang mempengaruhi pengembangan agroindustri pada kawasan industri masyarakat perkebunan perlu mendapat perhatian (Gianmarco,2001). Ada 5 faktor yang berperan dalam pengembangan agroindustri pada kawasan industri masyarakat perkebunan. Kelima faktor tersebut adalah sumberdaya manusia, teknologi, modal, bahan baku dan pasar.

Bagi pengembangan agroindustri pada kawasan industri masyarakat perkebunan di Provinsi Jambi maka kelima faktor tersebut memerlukan tindak lanjut agar bernilai guna bagi pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan. Tindak lanjut tersebut merupakan jbaran dari setiap faktor tersebut dalam kaitannya dengan pengembangan agroindustri pada kawasan industri masyarakat perkebunan.

Untuk mengembangkan agroindustri pada kawasan industri masyarakat perkebunan di Provinsi Jambi perlu pula dibangun politeknik agroindustri. Politeknik agroindustri tersebut akan membantu menyiapkan sumberdaya manusia yang ahli dalam teknologi dan manajemen industri. Disamping itu, juga perlu dibangun lembaga riset aplikasi teknologi agroindustri, guna memperluas pengembangan teknik produksi dan produk yang dihasilkan agroindustri.

Dalam rangka penguatan pemodaln bagi pengembangan agroindustri pada kawasan industri masyarakat perkebunan maka perlu juga dibangun pusat promosi dan investasi agroindustri (Masahisa,2001). Pada bagian lain, kepastian dan keberlanjutan tersedianya bahan baku bagi agroindustri juga perlu diperhatikan. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan pasar komoditas dan jejaring yang didukung dengan kemitraan.

### **3. Pola Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan**

Pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan di Provinsi Jambi harus terpola dan terarah agar sasaran pengembangan perkebunan yang berbasis pada potensi wilayah dapat tercapai. Untuk itu, rancang bangun bagi pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan juga harus mengacu pada pola pengembangan yang baku. Ada 6 pola pengembangan yang telah dibakukan dan dapat dijadikan acuan dalam pemilihan pola pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan di Provinsi Jambi.

Keenam pola pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan adalah pola koperasi usaha perkebunan, pola patungan koperasi – investor, pola patungan investor – koperasi. Pola BOT, pola BTN dan pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan. Dari keenam pola pengembangan tersebut maka pola yang cocok bagi pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan adalah pola nomor enam atau pola pengembangan yang saling menguntungkan, memperkuat dan membutuhkan antara pekebun dengan perusahaan perkebunan.

Pemilihan pola pengembangan yang saling menguntungkan didasarkan atas minat pekebun dan disukai oleh perusahaan perkebunan selaku investor. Dengan demikian, pola pengembangan yang dipilih amat ditentukan oleh negosiasi yang dilakukan. Agar pekebun tidak dirugikan untuk jangka panjang maka pekebun perlu didampingi tim advokasi baik secara individual maupun kelompok tani atau koperasi/KUD.

Tim advokasi bekerja untuk pekebun dalam jangka panjang agar pekebun dapat dilindungi atas praktek yang tidak menguntungkan pekebun. Ini berarti pemilihan pola pengembangan yang saling menguntungkan akan lebih objektif dan disukai pekebun dan investor dengan syarat harus melibatkan pihak ketiga yang dapat melindungi dan memihak kepada pekebun. Pihak ketiga tersebut dinamakan tim advokasi yang dipilih dan ditentukan oleh pekebun sebagai pembela dan pelindungnya. Biaya Tim Advokasi ini dapat ditanggung oleh pemerintah dan atau pekebun.

Untuk memilih dan memberdayakan pekebun maka diperlukan pula pembentukan tim pemberdayaan pekebun melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi. Sistem tersebut akan menumbuhkan semangat kebersamaan pekebun. Hal ini sangat penting dilakukan agar sifat individual pekebun dapat diubah menjadi sikap kebersamaan melalui kelompok tani pekebun atau koperasi.

Agar Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) ini dapat sukses maka perlu dilengkapi dengan pendampingan yang berlanjut, minimal selama 3

tahun. Pendampingan harus dilakukan oleh pendamping yang minimal DENGAN pengalaman kerja dalam pendampingan selama 10 tahun.

Terpilihnya pola pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan tipe pola yang saling menguntungkan akan menimbulkan spesifikasi pola pengembangan yang sesuai dengan potensi dan permasalahan dari setiap kawasan industri masyarakat perkebunan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena setiap kawasan industri masyarakat perkebunan berkembang atas dasar kesepakatan dari pelaku utama dalam pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan, asalkan saling menguntungkan antar pelaku utamanya yaitu pekebun dan investor.

Disamping itu untuk mendukung pelaksanaan pola saling menguntungkan maka diperlukan pula pembentukan Pusat Pengembangan Kerjasama Komoditas (Cooperative Commodity Development Center atau CCDC). Pusat pengembangan tersebut merupakan forum koordinasi dan komunikasi bagi pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan berdasarkan pola saling menguntungkan.

Pusat pengembangan kerjasama komoditas (CCDC) harus dirancang menjadi forum yang permanen sebagai penyelenggara bagi pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan di daerah. Oleh karena itu pusat pengembangan tersebut harus pula dikelola oleh seorang manejer yang profesional dalam mengelola kawasan industri masyarakat perkebunan. Operasional Pusat Pengembangan Kerjasama Komoditas (CCDC) harus didukung oleh sekretaris dan peralatan komunikasi yang permanen sehingga mampu sebagai fasilitator bagi pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan.

### **KESIMPULAN**

Upaya pencapaian tujuan program revitalisasi perkebunan karet rakyat melalui pendekatan kawasan industri masyarakat perkebunan yang prospektif membutuhkan infrastruktur dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, perancangan bagi pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan membutuhkan desain kawasan industri masyarakat perkebunan yang dinamis, dengan melibatkan banyak komponen baik internal maupun eksternal dari kawasan industri masyarakat perkebunan tersebut.

Sejalan dengan pemikiran tersebut maka dalam analisis ini telah dirancang strategi pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan. Agar strategi dan pola pengembangan tersebut dapat bersifat aplikatif maka diperlukan pemahaman secara seksama.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Eugenio Díaz-Bonilla, Lucio Rea. 2000. Trade and Agroindustrialization in Developing Countries: Trends and Policy Impacts. *Agricultural Economics* (23)3
- Bertrand Schmitt, Mark S. Henry. 2000. Size and Growth of Urban Centers in French Labor Market Areas: Consequences for Rural Population and Employment. *Regional Science And Urban Economics* (30)1
- Edward J. Feser. 2001. A Flexible Test for Agglomeration Economies in Two US Manufacturing Industries. *Regional Science And Urban Economics* (31)1
- Gianmarco I.P. Ottaviano. 2001. Monopolistic Competition, Trade, and Endogenous Spatial Fluctuations. *Regional Science And Urban Economics* (31)1
- Masahisa Fujita, Nobuaki Hamaguchi. 2001. Intermediate Goods and The Spatial Structure of An Economy. *Regional Science And Urban Economics* (31)1

Revitalisasi Perkebunan Karet..... (Surya Hidayat)\_\_\_\_\_